

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Reviu Penelitian Terdahulu

Hanifah and Praptoyo 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Hasil penelitian yaitu dengan menggunakan pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradigma deskriptif. Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.

Kholmi (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi digunakan sebagai analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat Desa. Prosedur

pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengimplementasikan ADD.

Astuty (2013). “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)” (Studi kasus pada alokasi dana desa Tahun Anggaran 2011 di desa sareng kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kuitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011. Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun bisa melaksanakan pengelolaan ADD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan tanpa ada persyaratan yang dilewatkan.

Farida, Jati et al. (2018) Melakukan penelitian terhadap Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan di sepuluh desa di Kabupaten Candipuro. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Candipuro pada tahap perencanaan, implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. sedangkan pada tahap pertanggungjawaban sudah cukup baik walaupun ada satu desa yang secara fisik belum akuntabel karena pembangunannya belum selesai.

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama (Tahun) | Metode | Hasil |
|----|-------------------------------|---|--|
| 1 | Farida, Jati et al. (2018) | Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bertujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan | Hasil penelitian menunjukan tahap perencanaan, implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| | | Candipuro, Kabupaten Lumajang yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.meningkatkan pendapatan desa. | akuntabilitas dan prinsip transparansi. |
| 2 | Kholmi (2017) | Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi digunakan sebagai analisis data. | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat Desa. |
| 3 | Hanifah and Praptoyo (2015) | Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu deskriptif | Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| | | | Belanja Desa (APBDesa). |
|--|--|--|----------------------------|

B. Landasan teori

1. Desa

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa dapat meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat yang ada di Desa. UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
- b) Kewenangan lokal berskala desa,
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten atau kota,
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (UU No. 6 2014 Pasal 56).

2. Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009), menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau tanggungjawab berwenang meminta nilai-nilai seperti efesiensi, efektifitas, realibilitas dan prediktabilitas. Akuntabilitas suatu hal yang tidak abstrak namun konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang spesifik mengenai masalah apa yang harus dipertanggungjawabkan.

Mardiasmo (2002) menyatakan tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

a) Prinsip Transparansi

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat lebih memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

b) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan pertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c) Prinsip value for money

Prinsip ini berarti penerapan tipe konsep yaitu ekonomi, efisiensi dan efektif dalam proses penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan public.

2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban untuk dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah atas pengelolaan dan pelaksanaan alokasi dana desa dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Karena pemerintah daerah merupakan sebagai pelaku pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:1290).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk : (a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

2.2 Indikator Akuntabilitas

Indikator merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja dalam pengelolaan alokasi dana desa ADD yang akuntabel. Beberapa indicator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Bima No. 7 Tahun 2017 dan Perbub No. 4 Tahun 2019. Dan indikatornya lebih kepada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan sebagai berikut : Indonesia demi mewujudkan keadilan

bagi seluruh rakyat Indonesia; (c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; (d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; (e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (f) Meningkatkan

1. Tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a) Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).
 - b) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Tahap proses Pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah
 - a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah :
 - a) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - b) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah :

Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode.

5. Tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah :

Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Selain itu, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi tolak ukur atau Indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Indikator Tahap Perencanaan
 - a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Indikator tahap Pelaporan
 - a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semesta pertama dan laporan semesta akhir tahun.

- b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
 - c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - d) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 3) Indikator tahap Pertanggungjawaban
- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban untuk dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah atas pengelolaan dan pelaksanaan alokasi dana desa dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Karena pemerintah daerah merupakan sebagai pelaku pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:1290).

3. Transparansi

([Mardiasmo 2006](#)) dalam Kristianten menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Menurut ([Andrianto 2007](#)), transparansi public adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya public. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya. Serta transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi mudah untuk dipahami dan di mengerti baik dari proses pemerintahan maupun kelembagaan.

Adapun beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto 2007) yaitu :

- a) Mencegah korupsi
- b) Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat mampu mengukur kinerja pemerintahan.
- d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.

- e) Menguatkan koleksi sosial, karena kepercayaan public terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pada pengelolaan ADD, transparansi merupakan hal yang sangat krusial untuk ditinjau secara mendalam. Sebab hal tersebut menjadi penting karena transparansi menunjukkan kinerja dari seorang pemimpin. Sebagai salah satu pelaksanaan dari prinsip indikator good governance, transparansi merupakan hal penting yang harus dikedepankan. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi.

Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk tindakan pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang akan diambil. Informasi yang terbuka dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat dan pemerintah untuk apa saja anggaran tersebut digunakan. Transparansi sangat diperlukan untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan program yang telah diselenggarakan pemerintah.

3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan. Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.

Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

3.2 Indikator tahap Transparansi

Menurut ([Andrianto 2007](#)) yang menjabarkan dari IDASA bahwa indikator transparansi terdiri dari :

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi :
 - a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b) Adanya kerangka kerja hukum yang mendefinisikan tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek manajemen fiskal.
 - c) Adanya basis legal untuk pajak.
 - d) Adanya pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing masing tingkatan pemerintah.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - a) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran atau prosesnya.
 - b) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
 - c) Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik mengandung beberapa indikasi fiskal.
 - e) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan actual.
3. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - a) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Untuk menguat pernyataan di atas tentang indicator transparansi pemerintah juga mengatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam keuangan daerah harus transparan sesuai peraturan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Dikatakan transparan apabila laporan keuangan daerah memenuhi peraturan berikut tentang Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Sedangkan Ismaya (2006 : 307) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (public finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas mengenai akuntansi pemerintah, penelitian dapat mengambil kesimpulan, bahwa akuntansi pemerintah adalah proses pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang bergerak di bidang unit pemerintahan seperti keuangan negara mengenai tahapan pelaksanaan anggaran.

Karakteristik Akuntansi Pemerintah Menurut Baswir (2000:11) karakteristik akuntansi pemerintah terdiri dari : (a) Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan; (b) Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan; (c) Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk

akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya; (d) Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

5. Alokasi Dana Desa

Dalam peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2005 menyatakan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per serratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

Dari peraturan pemerintah di atas dapat di jelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui pemerintah Daerah (Kabupaten). Dengan tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa, baik pembangunan fisik (Saranan dan Pra-sarana) maupun sumber daya manusia (SDM).

Faktor penting didirkanya ADD merupakan sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi serta dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyrakat desa. Sehingga pemerintah menargertkan setiap tahunya alokasi

dana desa selalu meningkat. Berlandasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga pendirian ADD bertujuan untuk sebagai berikut ;

- a) Meningkatkan pelayanan Publik publik di desa,
- b) Mengentaskan kemiskinan.
- c) Memajukan perekonomian desa.
- d) Membantu pemerdayaan ekonomi masyarakat desa, membangun infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa.
- e) Membangun sumber daya manusia (SDM), seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pemantauan yang tertata dan saling berhubungan.
- f) Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa.
- g) Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas public serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa.

Kabupaten Bima menyusun dan membagikan anggaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian selanjutnya akan disalurkan ke setiap kecamatan yang ada, Salah satunya yaitu Kecamatan Sape yang dibagi menjadi 18 Desa. Alokasi dasar setiap desa dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018. Dalam penyaluran alokasi dana desa dari RKUD ke RKD di bagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 40%.

6. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pengelolaan ADD keuangan desa telah dibuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa. Dan sesuai dengan permedagri No. 113 Tahun 2014, tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporann. Tujuanya untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Serta proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007.

Selain itu Pengelolaan alokasi dana desa sudah dijelaskan dalam peraturan menteri No. 07 Pasal 02 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Dana Desa sebagai berikut :

- a) Penganggaran
- b) Pengalokasian
- c) Penyaluran
- d) Penatausahaan, pertanggungjawab, dan pelaporan.
- e) Pedoman penggunaan, dan
- f) Pemantauan serta evaluasi.

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar oleh Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

7. Keuangan Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang keuangan Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71 ayat 2).

8. Laporan Keuangan Desa

Pada setiap akhir periode anggaran alokasi dana desa, kepala desa wajib menyusun laporan keuangan Desa. Menurut peraturan menteri dalam Negri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah terdiri atas : (1) Laporan Realisasi Anggaran yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan; (2) Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan; (3) Laporan Arus Kas yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara dengan kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan; (4) Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang mendukung yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Namun, karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki pada umumnya sehingga pemerintah desa hanya menetapkan laporan wajib yang sederhana yaitu berupa laporan Realisasi Anggaran (APBDRsa) yang kemudian turut serta dilampirkan (a) Buku Kas Umum; (b) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; (c) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran; (d) Buku Kas Harian Pembantu; (e) Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja ADD.

